



PENETAPAN

Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

- I. PEMOHON, Lahir di Kinabuhutan, 20 Oktober 1987 (30 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kinabuhutan Jaga II Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- II. PEMOHON, Lahir di Kinabuhutan, 10 Oktober 1989 (28 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kinabuhutan Jaga II Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo., tanggal 9 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sumardi Daluwu (Almarhum) dengan mahar berupa Uang Rp 50.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Bung Tomo Tampolo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Mustafa Tahumil dan Yusuf Tampolo;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - Julkifli Bulane (laki-laki) berumur 5 tahun;
  - Rilhadin Bulane (laki-laki) berumur 10 bulan;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Adi Bulane Bin Majid Bulane) dan Pemohon II (Nurmin Daluwu Binti Sumardi Daluwu) yang

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2011 di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kab. Minahasa Utara;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan dan majelis hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kecuali dalam hal pembayaran biaya perkara, sebab para pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Mustafa Tahumil, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di tinggal di Kinabuhutan, Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah tanggal 22 Mei 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sumardi Daluwu (Almarhum) dengan mahar berupa Uang Rp 50.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang menjadi saksi ketika itu adalah saya Mustafa Tahumil dan Yusuf Tampolo;

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pula yang menghalangi mereka kawin, seperti sesusuan;
- Bahwa para pemohon kini masih hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, serta tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa para pemohon telah pernah memiliki Buku Nikah, karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon untuk isbat nikah adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak;

Saksi II : Yusuf Tampolo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di tinggal di Kinabuhutan, Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah tanggal 22 Mei 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sumardi Daluwu (Almarhum) dengan mahar berupa Uang Rp 50.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Mustafa Tahumil dan saya Yusuf Tampolo;;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pula yang menghalangi mereka kawin, seperti sesusuan;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan (Isbat Nikah), sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu Ketua majelis membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Mei 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sumardi Daluwu (Almarhum) dengan mahar berupa Uang Rp 50.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Bung Tomo Tampolo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Mustafa Tahumil dan Yusuf Tampolo,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dihubungkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan kepentingan hukum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut antara pemohon I dengan pemohon II belum pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Likupang, sehingga para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2011 di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukum pernikahan, seperti adanya wali, dua orang saksi serta mas kawin;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut ketentuan syari'at maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1.-----

Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

**لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل**

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab

*Tuhfah*, hal.133 : **ويقبل افررا لبا لعة العا قلة با لنكاح**

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".

3. Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *'anattthalibin* : 4, hal. 254 :

**ولي وشاهدي عدل وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو**

Artinya :

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan atau telah terbukti dan oleh karena permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON) dan Pemohon II (PEMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2011 di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten. Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, untuk mencatat pernikahan mereka;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh Dr. M. Basir, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Rahmat, M.H., dan Drs. Burhanuddin Mokodompit, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Ulfa Jaba, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.



Drs. Rahmat, M.H.

Dr. M. Basir, M.H.

Drs. Burhanuddin Mokodompit

Panitera Pengganti,

Ulfa Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	125.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 216.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.



1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	2. Proses	Rp 50.000,00
2.	3. Panggilan	Rp 130.000,00
3.	4. Redaksi	Rp 5.000,00

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	5. Meterai	Rp 6.000,00
5.	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 221.000,00</b>
6.		
7.	.	

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO  
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 9 hal. Penetapan Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 9 hal. Penetapan Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo.